



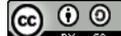
## AKUNTABILITAS TRANSPARANSI PENGELOLAAN BOS DALAM OPTIMALISASI MUTU PENDIDIKAN

Dian Sartika<sup>1</sup>, Masduki<sup>2</sup>, Heni Rochimah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafiiyah, Indonesia

Email: [diangitadinata@gmail.com](mailto:diangitadinata@gmail.com)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.632>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 23 May 2025

Final Revised: 5 June 2025

Accepted: 10 June 2025

Published: 31 June 2025

#### Keywords:

Transparency

BOS Fund Management

Education Quality

Accountability



### ABSTRAK

*This study aims to examine transparency in the management of Bantuan Operasional Sekolah (BOS) in Indonesia, which is considered as one of the determining factors for the success of the program. Transparency in the management of BOS funds can increase public and stakeholder trust, and support improvements in the quality of education. This study uses a qualitative approach with a case study method to explore the practice of transparency in the management of BOS funds in several schools. Data were collected through interviews with school principals, treasurers, school committee members, and analysis of financial report documents. The results of the study indicate that the publication of financial reports openly increases public trust, but challenges related to infrastructure and access to technology in certain areas need to be addressed. In addition, cooperation between the government, schools, and the community is essential to ensure effective use of funds and equal distribution of education quality. This study concludes that transparency in the management of BOS funds has a significant role in improving the quality of education in Indonesia.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia yang dinilai sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut. Transparansi pengelolaan dana BOS dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi praktik transparansi pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, anggota komite sekolah, dan analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan secara terbuka meningkatkan kepercayaan publik, tetapi tantangan terkait infrastruktur dan akses teknologi di beberapa area perlu diatasi. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan pemerataan mutu pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.*

**Kata kunci:** *Transparansi, Pengelolaan Dana BOS, Mutu Pendidikan, Akuntabilitas.*

## PENDAHULUAN

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan program ini. Pengelolaan dana yang terbuka memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau penggunaan anggaran secara efektif. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023, alokasi dana BOS mencapai Rp54,32 triliun untuk lebih dari 200.000 sekolah di seluruh Indonesia. Tetapi, tantangan dalam pengelolaan dana tersebut masih menjadi perhatian utama, terutama dalam aspek akuntabilitas dan keterbukaan laporan keuangan. Publikasi laporan keuangan secara berkala dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program BOS.

Survei Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa indeks persepsi korupsi di sektor pendidikan masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan skor 37 dari 100 (*JURNAL+HUKUM+GABRIELA*, n.d.). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, termasuk BOS, harus terus ditingkatkan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang sering kali memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, menghadapi kendala lebih besar dalam mematuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari data laporan tersebut, sekolah-sekolah yang rutin mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi (Johantri et al., n.d.). Pengelolaan yang transparan juga cenderung menghasilkan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Hubungan positif antara transparansi dan kualitas pendidikan menjadi alasan utama perlunya penguatan aspek ini dalam implementasi program BOS.

Urgensi transparansi pengelolaan dana BOS juga didukung oleh temuan dari laporan Bank Dunia tahun 2023, yang menyatakan bahwa penggunaan dana pendidikan yang tidak efisien menjadi salah satu penyebab rendahnya pencapaian pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Laporan tersebut menekankan bahwa akuntabilitas yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pembelajaran dan kualitas fasilitas pendidikan.

Adopsi teknologi dalam sistem pelaporan keuangan mulai menunjukkan dampak positif. Program digitalisasi pelaporan BOS yang diperkenalkan pada tahun 2021 oleh Kemendikbudristek, melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) (Mukmin & Dongoran, 2024), membantu sekolah menyusun laporan keuangan secara lebih efisien dan akurat. Namun, penerapan program ini belum merata, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet dan sumber daya manusia yang memadai.

Program BOS diharapkan menjadi instrumen untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia (Dana et al., 2025) (Devitrisia et al., 2025). Implementasi yang akuntabel dapat membantu mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Ketika semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap dana operasional, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara lebih merata.

Digitalisasi sistem pelaporan menjadi solusi potensial untuk meningkatkan akuntabilitas dana BOS. Aplikasi berbasis web memungkinkan pelaporan dan pemantauan dana secara real-time (Rizki Dwi Kurniawan et al., n.d.). Sistem ini telah diimplementasikan secara terbatas di beberapa wilayah dengan hasil yang cukup menjanjikan. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi kepala sekolah untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih sistematis.

Teknologi digital juga mempermudah akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana BOS (Agustine Kresnaya et al., n.d.). Informasi yang terbuka dan mudah diakses membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program (Nasi'ah et al.,

n.d.). Hal ini dapat mendorong penggunaan dana yang lebih bertanggung jawab oleh sekolah. Selain itu, sistem digital juga mengurangi risiko kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam pengelolaan manual.

Pelatihan kepada kepala sekolah dan bendahara menjadi aspek penting dalam penguatan kapasitas pengelolaan dana BOS(Wulandari, 2023). Pendidikan manajemen keuangan dapat membantu kepala sekolah menyusun laporan yang akurat dan sesuai dengan standar(Fauzi, 2017). Kegiatan pelatihan juga dapat meningkatkan pemahaman kepala sekolah mengenai regulasi terkait dana BOS. Dengan manajemen yang lebih baik, dana BOS dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Komite sekolah berperan sebagai mitra strategis dalam pengawasan penggunaan dana BOS. Keterlibatan komite dalam proses perencanaan dan evaluasi dapat membantu memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Peran aktif komite sekolah juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana. Regulasi yang mengatur peran komite sekolah perlu diperkuat untuk mendorong keterlibatan yang lebih signifikan(Rahmat & Suhardi, 2025). Pemerintah dapat menyediakan pedoman yang jelas bagi komite sekolah dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pemberian pelatihan kepada anggota komite sekolah dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami laporan keuangan.

Partisipasi masyarakat secara luas dalam pengelolaan dana BOS juga menjadi faktor yang sangat penting(Said et al., 2024a)(Sarjito, 2025). Masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap alokasi anggaran yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Keterlibatan masyarakat menciptakan rasa memiliki terhadap program ini, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan program BOS.

Peningkatan akuntabilitas dana BOS tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan tetapi juga memperkuat tata kelola sekolah secara keseluruhan(Karimah & Ginanjar, 2024). Sekolah yang mampu mengelola dana dengan baik akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi menjadi indikator keberhasilan sekolah dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pendidikan.

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas program BOS. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengatasi hambatan distribusi dana. Pemerintah daerah juga dapat membantu sekolah dalam menyusun laporan keuangan dan memberikan bimbingan teknis kepada kepala sekolah. Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOS di tingkat lokal(Ananta & Kurniati, n.d.). Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program BOS perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program ini. Proses evaluasi dapat mencakup analisis terhadap penggunaan dana, pencapaian target, dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program BOS di masa depan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS, dibutuhkan peningkatan kemampuan komunikasi antara kepala sekolah, komite sekolah, dan pemerintah daerah. Komunikasi yang jelas dan terstruktur memastikan dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan(Nabila et al., 2025). Tanpa komunikasi yang baik, pengelolaan dana BOS dapat terhambat dan tidak sejalan dengan prioritas sekolah(Jantika Eysi et al., n.d.). Peningkatan komunikasi ini juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana dan memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif.

Pengawasan internal dalam pengelolaan dana BOS harus diperkuat(Ananda et al., 2025)(Handraini et al., 2025). Sekolah perlu memiliki sistem pengendalian yang efektif agar

dana digunakan dengan tepat. Prosedur pencatatan dan pelaporan yang jelas harus diterapkan untuk memastikan transaksi tercatat secara akurat. Tanpa pengawasan internal yang baik, potensi penyalahgunaan dana meningkat dan akuntabilitas dapat terhambat. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan internal harus dilakukan melalui pelatihan yang berkelanjutan bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS juga diperlukan (Zamaludin et al., 2024). Kepala sekolah dan bendahara sekolah perlu mendapatkan pelatihan yang memadai agar dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Nur Dahyanti et al., 2024). Kendala muncul ketika tidak semua pihak memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan, sehingga pelatihan terus-menerus perlu diberikan untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Penerapan audit oleh auditor independen mendukung pengelolaan dana BOS yang sesuai aturan (Heni et al., 2025). Pemerintah memberikan dukungan agar auditor memiliki akses penuh ke seluruh dokumen yang dibutuhkan dan memastikan audit dilakukan secara transparan. Audit ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan dana, dan keberadaannya dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana di sekolah-sekolah.

Sistem pelaporan berbasis teknologi memberikan kemudahan dalam memonitor penggunaan dana BOS (Mohammad Hajir Suleman et al., 2025a). Dengan aplikasi digital, laporan keuangan sekolah dapat dipantau secara real-time oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya. Meski demikian, penerapan sistem digital ini menghadapi tantangan infrastruktur, terutama di daerah dengan akses internet terbatas. Untuk itu, perhatian khusus perlu diberikan agar seluruh sekolah dapat mengakses sistem ini secara merata.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan dana BOS sangat penting. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat lebih aktif memberikan masukan mengenai alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah (Marsa & Santoso, n.d.-a). Keterlibatan aktif masyarakat mempercepat terwujudnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperluas program pendidikan publik mengenai pengelolaan dana BOS.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola program BOS di tingkat lokal. Pemerintah daerah berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan sekolah, serta membantu mengatasi hambatan dalam distribusi dana (Ariani et al., 2025). Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOS dan memudahkan sekolah dalam menyusun laporan keuangan serta mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul.

Sekolah perlu memiliki mekanisme audit yang baik untuk memastikan penggunaan dana BOS berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nahdiyyah, n.d.). Proses audit yang independen dan objektif akan memberikan evaluasi mengenai penggunaan dana dan menjadi dasar bagi perbaikan di masa mendatang. Audit yang transparan akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS.

Komite sekolah berperan dalam mengawasi alokasi dana BOS. Keterlibatan komite sekolah dalam evaluasi penggunaan dana dapat meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. Pemerintah dapat memperkuat peran komite sekolah dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dana. Pelatihan bagi komite sekolah juga perlu ditingkatkan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang laporan keuangan dan penggunaan dana. Dengan pemahaman yang lebih dalam, komite sekolah

dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana BOS. Komite yang terlatih dapat menjadi mitra yang lebih berperan dalam memastikan keberhasilan program BOS di tingkat sekolah.

Proses pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan (Heti Tri Rahmawati et al., n.d.). Sekolah yang mampu mengelola dana dengan baik akan lebih mudah memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah (Oktavia et al., 2023). Pengelolaan dana BOS yang transparan memperkuat posisi sekolah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa.

Analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat transparansi dalam pengelolaan dana BOS dapat membantu merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Dengan demikian, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia menjadi lebih memungkinkan. Dengan pengawasan yang baik dan pelatihan yang berkelanjutan, pengelolaan dana BOS diharapkan dapat terus membaik. Program ini memberikan manfaat langsung bagi siswa dan masyarakat, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Keberhasilan dalam pengelolaan dana BOS menjadi langkah maju dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan siap bersaing di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis transparansi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah Indonesia. Metode ini bertujuan untuk menggali praktik dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam penerapan transparansi. Fokus penelitian diarahkan pada sekolah-sekolah yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria seperti tingkat transparansi pelaporan keuangan, akses terhadap teknologi pelaporan, serta lokasi geografis yang mencerminkan kondisi perkotaan dan pedesaan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, bendahara, dan anggota komite sekolah untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan dana, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan transparansi. Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk mencatat aktivitas pengelolaan dan pelaporan dana secara langsung. Selain itu, dokumen seperti laporan keuangan, rencana anggaran, dan laporan audit dianalisis guna mengevaluasi kesesuaian praktik pelaporan dengan standar akuntabilitas.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode tematik. Proses analisis melibatkan pengkodean awal untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pengelompokan data ke dalam kategori tertentu seperti transparansi pelaporan dan keterlibatan masyarakat, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antar tema. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas, sedangkan reliabilitas diperkuat melalui konfirmasi hasil dengan para informan. Pendekatan ini menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai transparansi dalam pengelolaan dana BOS, termasuk identifikasi praktik terbaik yang telah diterapkan dan hambatan yang perlu diatasi. Hasil penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Hasil*

Penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan yang berkaitan dengan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah di Indonesia. Sebagian besar sekolah yang terlibat dalam penelitian ini telah melakukan upaya transparansi yang cukup baik, namun terdapat variasi dalam tingkat keberhasilan antara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di kota cenderung lebih rutin dalam mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS secara berkala. Beberapa di antaranya menggunakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi penggunaan dana secara langsung dan real-time. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana di sekolah mereka.

Sekolah-sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi. Meskipun ada upaya untuk menyusun laporan keuangan secara rutin, keterbatasan akses internet dan kurangnya pelatihan mengenai penggunaan aplikasi digital membuat pengelolaan dana BOS di wilayah pedesaan berjalan lebih lambat. Hanya sebagian kecil sekolah di daerah terpencil yang telah mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis digital dengan sukses. Sebagian besar sekolah di daerah ini masih mengandalkan laporan manual yang kadang tidak memadai dalam hal detail dan keterbukaan informasi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS yang transparan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang terlibat dalam penelitian ini. Sekolah yang mampu mengelola dana dengan baik lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar operasional mereka, seperti pembelian buku pelajaran, alat-alat pendidikan, dan perawatan fasilitas sekolah. Transparansi ini membantu sekolah untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa, komite sekolah, dan pemerintah daerah. Masyarakat merasa lebih percaya bahwa dana yang dikelola digunakan untuk kepentingan pendidikan yang optimal.

Salah satu faktor yang mendukung pengelolaan dana BOS yang transparan adalah adanya pelatihan rutin bagi kepala sekolah dan bendahara. Sekolah yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan penggunaan aplikasi pelaporan digital melaporkan bahwa mereka lebih mudah dalam menyusun laporan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang regulasi yang terkait dengan penggunaan dana BOS, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana.

Pentingnya keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS juga terlihat jelas dalam hasil penelitian ini. Sekolah yang melibatkan komite sekolah secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana BOS menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Komite sekolah yang terlatih dengan baik dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas sekolah dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Selain itu, komite sekolah berperan sebagai penghubung antara pihak sekolah dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana.

Tantangan dalam pengelolaan dana BOS yang transparan masih sangat besar. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal kapasitas manajerial dan infrastruktur pendukung. Sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus lebih memperhatikan faktor distribusi yang adil antara daerah perkotaan dan pedesaan agar semua sekolah dapat mengimplementasikan praktik transparansi yang serupa.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam hal transparansi, banyak sekolah yang masih membutuhkan dukungan tambahan dalam hal perangkat teknologi dan pelatihan. Pemerintah daerah dapat berperan penting dalam memberikan dukungan tersebut, baik dalam bentuk pengadaan infrastruktur teknologi yang memadai maupun dalam penyediaan pelatihan untuk kepala sekolah dan bendahara. Beberapa sekolah melaporkan bahwa mereka kesulitan dalam memanfaatkan teknologi pelaporan karena kurangnya perangkat keras yang memadai dan keterbatasan jaringan internet yang stabil.

Evaluasi yang dilakukan terhadap laporan keuangan sekolah menunjukkan bahwa laporan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan dana BOS. Sekolah-sekolah yang rutin mengadakan forum atau rapat untuk membahas laporan keuangan dengan masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi di antara orang tua siswa. Keterlibatan orang tua dalam proses ini tidak hanya membantu menciptakan rasa memiliki terhadap sekolah, tetapi juga memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana.

Sebagian besar sekolah yang terlibat dalam penelitian ini masih menghadapi masalah dalam hal pemahaman regulasi dan standar pelaporan keuangan yang harus dipenuhi. Meskipun pelatihan telah dilakukan, pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan pelaporan yang benar masih terbatas pada beberapa individu di sekolah, seperti kepala sekolah dan bendahara. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan dana BOS sangat dipengaruhi oleh adanya audit eksternal yang dilakukan oleh pihak independen. Sekolah-sekolah yang telah diaudit secara rutin menunjukkan tingkat pengelolaan dana yang lebih baik dan lebih transparan. Auditor independen dapat memberikan pandangan objektif tentang penggunaan dana dan mengidentifikasi potensi masalah yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, audit yang teratur dan transparan menjadi elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Selain audit, keberadaan sistem pelaporan yang berbasis aplikasi digital dapat mempercepat proses evaluasi dan pengawasan. Dengan adanya sistem ini, laporan keuangan dapat diperiksa secara real-time, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana. Beberapa sekolah yang telah mengimplementasikan sistem ini melaporkan bahwa mereka merasa lebih mudah dalam memonitor pengeluaran dan pendapatan sekolah. Hal ini memberikan rasa aman bagi pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pengawasan dan pelatihan membuat beberapa sekolah kesulitan untuk memenuhi standar transparansi yang diharapkan. Sekolah-sekolah di wilayah yang memiliki pemerintahan daerah yang aktif dalam mendukung pengelolaan dana BOS secara transparan lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah, terlepas dari lokasi atau kondisi infrastruktur, dapat mengakses dukungan yang sama.

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pengelolaan dana yang baik

dapat membantu meminimalkan penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pengelolaan dana BOS yang lebih baik dan lebih transparan di masa depan.

### *Pembahasan*

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS terbukti memiliki korelasi erat dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Di wilayah perkotaan, penggunaan aplikasi pelaporan digital seperti SIPLah mempermudah proses penyusunan laporan keuangan dan mempercepat akses masyarakat terhadap informasi keuangan sekolah. Temuan ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh (Rahmat & Suhardi, 2025), yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam pelaporan keuangan mampu meningkatkan efisiensi administrasi hingga 40%. Publikasi laporan secara berkala melalui platform digital juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana oleh sekolah.

Kendala infrastruktur di daerah pedesaan menjadi hambatan signifikan dalam menerapkan prinsip transparansi yang sama. Sekolah-sekolah di daerah terpencil melaporkan keterbatasan akses internet sebagai penghalang utama dalam mengintegrasikan teknologi pelaporan keuangan. Selain itu, perangkat keras yang tidak memadai memperlambat proses pelaporan manual yang masih dominan di wilayah ini. Mohammad Hajir Suleman et al. (2025) mencatat bahwa sekolah-sekolah di wilayah dengan infrastruktur terbatas menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana di wilayah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Mohammad Hajir Suleman et al., 2025b).

Pelatihan bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi. Studi yang dilakukan oleh Said et al. menunjukkan bahwa pelatihan reguler mampu meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman manajerial hingga 50% (Said et al., 2024b). Temuan ini menguatkan fakta bahwa pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga pengelola dana BOS dapat memenuhi standar transparansi yang diharapkan. Akan tetapi, distribusi pelatihan yang belum merata mengakibatkan banyak sekolah di daerah terpencil tidak mendapatkan akses pelatihan, sehingga pengelolaan dana di wilayah ini tetap tertinggal.

Keterlibatan komite sekolah sebagai mitra strategis dalam pengelolaan dana BOS memperlihatkan hasil yang positif dalam meningkatkan transparansi. Sekolah yang melibatkan komite secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Marsa & Santoso (n.d.) menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran meningkatkan akuntabilitas sekolah secara signifikan (Marsa & Santoso, n.d.-b). Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa anggota komite sekolah sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami laporan keuangan, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, pelatihan teknis bagi anggota komite menjadi langkah penting untuk memperkuat peran mereka dalam proses ini.

Audit internal dan eksternal memainkan peran kunci dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Sekolah-sekolah yang secara rutin diaudit menunjukkan tingkat pengelolaan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang tidak diaudit. Auditor independen mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan. Ananda et al. mencatat bahwa audit berkala

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan hingga 30% . Akan tetapi, proses audit yang sering kali memakan waktu panjang dan kurangnya koordinasi dengan pihak auditor menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Ketidakesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan operasional sekolah masih menjadi isu utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Kepala sekolah melaporkan bahwa dana BOS sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perbaikan fasilitas, pembelian alat peraga, dan pengadaan buku pelajaran. Laporan Bank Dunia (2023) mencatat bahwa alokasi dana yang tidak merata memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (*Executive-Summary*, n.d.). Kebijakan alokasi yang lebih adil dan berorientasi pada kebutuhan operasional sekolah harus menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan.

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan pelatihan, penguatan infrastruktur, penyempurnaan sistem audit, serta kebijakan distribusi dana yang lebih proporsional menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program BOS dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Publikasi laporan keuangan secara terbuka memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memantau penggunaan dana secara lebih efektif. Sekolah-sekolah yang rutin mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat, yang berujung pada terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik dan peningkatan kualitas pendidikan.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi transparansi, seperti keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, perlu mendapatkan perhatian serius. Akses internet yang terbatas dan keterbatasan perangkat keras menjadi hambatan yang signifikan dalam menerapkan sistem pelaporan digital dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan pelatihan bagi kepala sekolah serta staf keuangan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pengelolaan dana BOS dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan di seluruh wilayah Indonesia.

Kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan dana BOS yang lebih baik. Partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengawasan dan pengelolaan dana memastikan penggunaan dana sesuai peruntukannya. Transparansi yang tinggi mendorong akuntabilitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah.

## REFERENSI

- Agustine Kresnaya, N., Amelia Puja Lestari, B., Anggrahini, L., & Intan Anindyah Rosita, N. (n.d.). 57 | *JURNAL CENDEKIA PENDIDIKAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MTSN 2 SEMARANG*.
- Ananda, D., Aprillianda, E., & Sari, K. (2025). *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI) Pendidikan Perempuan sebagai Katalisator Perubahan Sosial dan Kesetaraan Gender*. 3(1), 39–54.

<https://doi.org/10.61930/pjpi.v3i1>

- Ananta, R., & Kurniati, E. (n.d.). *ANALISIS KESESUAIAN SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGAN MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH*.
- Ariani, A., Aji Pangestu, S., Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana, P., & Saifuddin Zuhri Purwokerto, U. K. (2025). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN MUTU DI SMK*. 5(1), 2025. <https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial>
- Dana, P., Di, B., Ungaran, S., Ardinigrum, W., Arni, A., & Rasyid, A. F. (2025). PT. Media Akademik Publisher *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM. JMA*), 3(5), 3031-5220. <https://doi.org/10.62281>
- Devitrisia, N., Putri, D., Maula, N., & Rindjani, A. D. (2025). PT. Media Akademik Publisher *MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN DI SMA NEGERI 3 SEMARANG Oleh. JMA*), 3(5), 3031-5220. <https://doi.org/10.62281>
- Executive-Summary*. (n.d.).
- Fauzi, M. (2017). *KEPENTINGAN PEMERINTAH INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL DALAM UPAYA MEMINIMALISIR TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA*. In *JOM FISIP* (Vol. 4, Issue 1).
- Handraini, H., Putri, N., & Umar, G. (2025). Problematika Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2195>
- Heni, O. ; Seviani, N., Pamungkas, R. R., & Veda, O. X. (2025). PT. Media Akademik Publisher *EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN KEMENDIKBUDRISTEK DI SMA NEGERI 13 SEMARANG. JMA*), 3(5), 3031-5220. <https://doi.org/10.62281>
- Heti Tri Rahmawati, C., Amelia, D., Fariantin, E., Made Murjana, I., Gunawan, C., Sihombing, L., & Khazin Fauzi, A. (n.d.). *Tim Penulis*. [www.penerbitseval.com](http://www.penerbitseval.com)
- Jantika Esyi, A., Silviana Putri, T., Aurora Ferdina Hermawan, S., & Amelya Tourmaline, Z. (n.d.). *Analisis Implementasi Alokasi Belanja Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya: Studi Kasus Tahun 2023-2024*. 2(2), 165-175. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.306>
- Johantri, B., DIV Akuntansi Sektor Publik, P., Keuangan Negara STAN Sopian, P., III Akuntansi Sektor Publik, P. D., Keuangan Negara STAN Asqolani, P., & Keuangan Negara STAN Bagasjohantri, P. (n.d.). *MENGUKUR AKUNTABILITAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH. JURNAL+HUKUM+GABRIELA*. (n.d.).
- Karimah, A., & Ginanjar, W. (2024). *OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BOS UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH*. In *Digdaya Jurnal Inovasi Pedagogi Mutakhir* (Vol. 1, Issue 1).
- Marsa, D. M., & Santoso, R. S. (n.d.-a). *IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG*. <http://fisip.undip.ac.id>
- Marsa, D. M., & Santoso, R. S. (n.d.-b). *IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG*. <http://fisip.undip.ac.id>
- Mohammad Hajir Suleman, Irawati Abdul, & Fitri Hadi Yulia Akib. (2025a). *Determinan Kemiskinan Anak di Pulau Sulawesi, Maluku Dan Papua : Perspektif Pendidikan*.

- Economic Reviews Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.723>
- Mohammad Hajir Suleman, Irawati Abdul, & Fitri Hadi Yulia Akib. (2025b). Determinan Kemiskinan Anak di Pulau Sulawesi, Maluku Dan Papua: Perspektif Pendidikan. *Economic Reviews Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.723>
- Mukmin, A. B., & Dongoran, F. R. (2024). Analisis Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLAH) Dalam Transparansi Anggaran Di SMAN 2 Gunung Meriah Aceh Singkil. 10(1).
- Nabila, N., Mauwa, N. K., Young, J. S., Ismanto, B., & Trisatyawati, S. (2025). Analisis Pelaksanaan dan Dampak Program Indonesia Pintar (Pip) Di Sekolah Menengah Atas. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 6(2), 203–212. <https://doi.org/10.55681/nusra.v6i2.3359>
- Nahdiyyah, I. R. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Cirebon). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 7300–7312.
- Nasi'ah, E. Z., Nawa Aprilia, I., & Sa'adah, Z. (n.d.). CENDIKIA PENDIDIKAN STRATEGI OPTIMALISASI DANA BOS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>
- Nur Dahyanti, Sylvi Marsella Diastami, Azra Humaira, & Tengku Darmansah. (2024). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 87–100. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.545>
- Oktavia, Y., Afifi, A. A., Eliza, M., & Abbas, A. F. (2023). Pengembangan TDR-IM Sistem Informasi Manajemen Keuangan Siswa di Pondok Pesantren: Integrasi, Simplifikasi dan Digitalisasi. *Journal of Regional Development and Technology Initiatives*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.58764/j.rtdi.2023.2.28>
- Said, M., Sulhan, A., & Hakim, L. (2024a). Optimalisasi Manajemen Dana Bos dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1864–1872. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2441>
- Said, M., Sulhan, A., & Hakim, L. (2024b). Optimalisasi Manajemen Dana Bos dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1864–1872. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2441>
- Sarjito, A. (2025). Transparency of Papua's Special Autonomy Funds: Is It Possible? *Journal of Governance Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.5627>
- Wulandari, R. (2023). DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN. 09. <https://journal.upy.ac.id/index.php/JPI/index>
- Zamaludin, M. E., Ega Zamaludin, M., & Sampurna, R. H. (2024). ELSE (Elementary School Education Journal) IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/pgsd>

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

**CC-BY-SA**